

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kemiskinan menjadi salah satu target kebijakan pembangunan di setiap daerah berbagai kegiatan pelatihan dilakukan agar kesenjangan pendapatan menjadi semakin kecil. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena dalam menanggulangi masalah yang dihadapi bukan saja terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan, tetapi juga melibatkan preferensi, nilai dan politik.

Persoalan kemiskinan di daerah maju merupakan bagian terkecil dalam komponen masyarakat mereka. Berbeda halnya dengan daerah berkembang dimana persoalan menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk tidak mampu hampir mencapai setengah dari total penduduk. Bahkan ada daerah-daerah sangat tidak mampu yang mempunyai jumlah penduduk tidak mampunya melebihi dua pertiga dari penduduknya.

Diantara kategori pekerjaan terkait dengan kemiskinan, nelayan sering disebut sebagai masyarakat termiskin dari kelompok

masyarakat lainnya (*the poorest of the poor*). Berdasarkan data *World Bank* mengenai kemiskinan bahwa 108,78 juta orang atau 49 persen dari total penduduk Indonesia dalam kondisi tidak mampu dan rentan menjadi miskin. Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011 mencatat jumlah nelayan berpenghasilan rendah di Indonesia mencapai 7,87 juta orang atau sekitar 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang.¹ Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2016 Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pendapatan nelayan selama satu bulan hanyalah sebesar Rp 1.032.080, dimana nilai pendapatan sangatlah jauh dari Upah Minimum Regional (UMR) yang mencapai Rp Rp 1.997.819 per bulannya.

Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial (Suharto, 2005). Oleh karena itu, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan nelayan atau masyarakat pinggiran pantai, diantaranya; Kebijakan pemerintah yang tidak

¹ <https://economy.okezone.com/read/2014/11/24/320/1069854/25-penduduk-miskin-adalah-nelayan> diakses pada tanggal 28 Maret 2018

memihak masyarakat tidak mampu, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan.

Kondisi lain yang turut berkontribusi memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup. Tidak pantas jika kita menyebutkan nelayan pemalas, karena jika dilihat dari daur hidup nelayan yang selalu bekerja keras. Namun kendalanya adalah pola hidup konsumtif, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. Namun ketika paceklik, pada akhirnya berhutang, termasuk kepada lintah darat, yang justru semakin memperberat kondisi. Deskripsi diatas merupakan pusran masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan umumnya di Indonesia.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, jumlah penduduk tidak mampu mencapai 28,07 juta orang, dimana 25,14 persen diperkirakan tinggal di wilayah pesisir pantai. Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode Maret 2015 – September 2015, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan mengalami penurunan sebanyak 8,2 ribu orang (dari 894,33 ribu orang menjadi 886,18 ribu orang) dan untuk perkotaan mengalami kenaikan sebanyak 5,4 ribu orang (dari 100,34 ribu orang menjadi 105,70 ribu orang).

Persentase penduduk berpenghasilan rendah di daerah pedesaan turun dari 22,15 persen pada Maret 2015 menjadi 21,78 persen pada September 2015. Sementara persentase penduduk berpenghasilan rendah di daerah perkotaan pada Maret 2015 sebesar 10,23 persen, naik menjadi 10,68 persen pada September 2015. Pada periode Maret 2015 – September 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 3,338 pada Maret 2015 menjadi 3,252 pada September 2015. Sedangkan Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,826 menjadi 0,792 pada periode yang sama.²

Secara lebih rinci terdapat 5 (lima) masalah pokok terkait penyebab kemiskinan masyarakat nelayan menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2016³, diantaranya:

1. Kondisi Alam. Kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan terjadi disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya.
2. Tingkat pendidikan nelayan. Nelayan yang kurang pengetahuan pendidikan seputar nelayan umumnya belum banyak tersentuh teknologi penangkapan ikan modern, kualitas sumber daya manusia rendah dan tingkat produktivitas hasil tangkapannya juga sangat rendah.
3. Pola kehidupan nelayan. Pola hidup konsumtif menjadi masalah laten pada masyarakat nelayan, dimana pada saat penghasilan

² <https://www.bps.go.id/pressrelease/2016/01/04/1227/persentase-penduduk-miskin-september-2015-mencapai-11-13-persen.html> diakses pada tanggal 28 Maret 2018

³ <http://harian.analisadaily.com/opini/news/mengentaskan-kemiskinan-nelayan/226240/2016/04/01> diakses pada tanggal 28 Maret 2018

banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder.

4. Pemasaran hasil tangkapan. Tidak semua daerah pesisir memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal tersebut membuat para nelayan terpaksa untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak dengan harga di bawah harga pasar.
5. Program pemerintah yang belum memihak nelayan, kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat top down dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kebijakan yang pro atau memihak pada nelayan mutlak diperlukan, yakni sebuah kebijakan sosial yang akan mensejahterakan masyarakat dan kehidupan nelayan.

Melihat pada poin kedua, Pendidikan menjadi salah faktor penyebab kemiskinan daerah tersebut. Tingkat Pendidikan seorang nelayan sangat mempengaruhi akan kemampuannya dalam menangkap ikan dan hasil tangkapannya. Selain itu dengan menambah Pendidikan nelayan tersebut sehingga dapat menambah pengetahuan dan keahlian sehingga dapat mencari penghasilan dengan mata pencaharian lainnya.

Merujuk kepada definisi Teknologi Pendidikan Menurut AECT Tahun 2004 mendefinisikan sebagai “*Educational technology is the study and ethical of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological processes and resources*”.⁴ Dalam definisi itu dijelaskan bahwa ilmu Teknologi Pendidikan dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang ada dengan membuat, menggunakan, maupun mengatur sumber belajar untuk digunakan sebagai fasilitas belajar para nelayan. Salah satu peran Teknologi Pendidikan yaitu dapat membantu untuk membuat pelatihan-pelatihan yang diperlukan para nelayan sehingga taraf hidupnya meningkat.

Serta definisi Teknologi Pendidikan yang terbaru pada 2018, yang mendefinisikan sebagai “Educational technology is the study and ethical application of theory, research, and best practices to advance knowledge as well as mediate and improve learning and performance through the strategic design, management and implementation of learning and instructional processes and resources.” Dalam definisi ini dijelaskan bahwa Teknologi Pendidikan merupakan praktik terbaik dalam memajukan atau meningkatkan pengetahuan dengan cara membuat dan melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu peneliti

⁴ Alan Januszewski & Michael Molenda, *Educational Technology*

ingin mengembangkan *website* dengan tujuan membantu pemuda penggerak desa mengumpulkan informasi dalam menentukan pelatihan yang dibutuhkan nelayan agar dapat meningkatkan pengetahuan nelayan dan menambah keahlian dalam menambah mata pencaharian untuk dijadikan sebagai modal dalam menaikkan taraf hidupnya.

Menurut Agus Suryana, dalam bukunya yaitu Panduan Praktis Mengelola Pelatihan, menjelaskan bahwa pelatihan adalah setiap aktivitas formal dan informal yang memberikan kontribusi pada perbaikan dan peningkatan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan. Menurutnya, pelatihan mencakup pembelajaran untuk melakukan sesuatu dan jika itu berhasil maka hasilnya terlihat dalam melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda.⁵ Oleh karena itu pelatihan sangat diperlukan oleh para nelayan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap para nelayan agar dapat meningkatkan hasil tangkapannya.

Namun, kebutuhan pelatihan di setiap daerah pastinya berbeda-beda. Sehingga diperlukan identifikasi kebutuhan pelatihan dalam menentukan kebutuhan pelatihan yang diperlukan nelayan di daerah tersebut. Identifikasi adalah suatu kegiatan mencari, menemukan,

⁵ Agus Suryana, Panduan Praktis Mengelola Pelatihan. (Jakarta: Edsa Mahkota 2006), h.1-2

mendaftar, mencatat, menemukan, mendaftar, mencatat data yang belum diketahui, mengenai sasaran, kemudian data tersebut diolah menjadi informasi.⁶ Maka identifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan definisi identifikasi tersebut ialah suatu kegiatan mencari data-data masalah sehingga di temukan informasi kebutuhan pelatihan yang diperlukan.

Sebagai contoh nelayan tangkap di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2013 jumlahnya hanya mencapai 47.927 orang, namun pada 2016 meningkat menjadi 75.850 orang atau mengalami kenaikan sekitar 63 persen,⁷ Dari puluhan ribu orang tersebut, mereka tergabung dikomunitas nelayan di daerahnya masing-masing. Setiap komunitas nelayan terdapat kelompok yang bernama Pemuda Penggerak Desa. Pemuda Penggerak Desa memiliki tugas untuk mengumpulkan informasi-informasi pelatihan yang dibutuhkan oleh para nelayan serta memberikan pelatihan yang dibutuhkan nelayan didaerahnya masing-masing. Melihat banyaknya jumlah komunitas nelayan di daerah itu sehingga dibutuhkan banyak sekali jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh para nelayan.

⁶ Soemardi, Identifikasi Kebutuhan dan Bahan Belajar Pendidikan Luar Sekolah. (Jakarta: Karunika Universitas Terbuka 1987), h. 15

⁷ <https://kupang.antaranews.com/berita/2377/nelayan-tangkap-bertambah-63-persen> diakses pada tanggal 24 April 2018

Untuk menyatukan semua informasi kebutuhan pelatihan diperlukan teknologi yang dapat digunakan oleh para Pemuda Penggerak Desa dalam menentukan pelatihan yang dibutuhkan nelayan. Teknologi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yaitu *website*. *Website* adalah sebuah kumpulan dari halaman dalam *website* yang saling berhubungan dan dapat diakses melalui halaman depan (*home page*) menggunakan sebuah browser.

Website merupakan wadah yang cocok untuk digunakan dalam menaruh informasi tentang kebutuhan pelatihan nelayan. *Website* dapat menampilkan beragam informasi yang dapat diakses oleh Pemuda Penggerak Desa untuk mengetahui pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan dikomunitas nelayannya. *Website* juga dapat diperbaharui apabila terdapat informasi baru tentang nelayan. Oleh karena itu peneliti ingin mengembangkan wadah pengumpulan informasi kebutuhan pelatihan nelayan dengan membuat sebuah *website*.

Selain itu penelitian ini merupakan penelitian rujukan dari penelitian yang sedang dilakukan oleh Bapak Cecep Kustandi, M.Pd yang bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia bagian Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Penelitian dan Informasi Pusat Pelatihan Masyarakat. Penelitian yang sedang

dilakukan berjudul Analisis Kebutuhan Pelatihan Berbasis Teknologi. Sehingga peneliti mengembangkan teknologi yang di maksud dengan menggunakan teknologi *website*. *Website* yang dikembangkan oleh peneliti dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan nelayan di setiap pesisir pantai. Dimana hasil dari identifikasi kebutuhan pelatihan dapat digunakan oleh pihak Kementrian maupun pihak penyelenggara pelatihan untuk menyelenggarakan pelatihan yang dibutuhkan ditempat tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis masalah yang telah dijelaskan pada penelitian, masalah-masalah yang telah teridentifikasi yaitu:

1. Bagaimana mengembangkan *website* identifikasi kebutuhan pelatihan nelayan pesisir pantai?
2. Bagaimana implementasi penggunaan *website* identifikasi kebutuhan pelatihan nelayan pesisir pantai?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, ruang lingkup dari pengembangan *website* ini adalah dengan menghasilkan sebuah *website* yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dari

Identifikasi Kebutuhan Pelatihan nelayan di Pesisir Pantai. Materi ini akan dikembangkan dalam bentuk *website*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan ruang lingkup yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian pengembangan ini adalah: “Bagaimana mengembangkan *website* Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Nelayan Pesisir Pantai?”.

E. Tujuan Pengembangan

Tujuan dilakukannya pengembangan ini adalah untuk merancang dan mengembangkan produk *website* identifikasi kebutuhan pelatihan nelayan pesisir pantai dengan menggunakan model *waterfall* untuk mengetahui kebutuhan pelatihan nelayan di daerah tersebut dalam meningkatkan pengetahuan dan menambah *skill* atau kemampuan untuk menambah sumber mata pencaharian nelayan tersebut.

F. Manfaat Pengembangan

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberkan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perkembangannya.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk para Nelayan di Pesisir Pantai.
- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian yang lain.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Bagi peneliti berguna sebagai pengetahuan baru dan memberikan pengalaman yang baru dalam kemampuan untuk meneliti.

b. Pemuda Penggerak Desa

Memudahkan pemuda penggerak desa untuk berbagi informasi kebutuhan pelatihan disetiap daerahnya. Serta mengetahui kebutuhan pelatihan terbaru sesuai perkembangan di daerahnya.